

KINERJA PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN GIRI MADIA RESORT JANGKOK KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN RINJANI BARAT

*Performance Of Community Forest Management Giri Madia In Resort Jangkok In
West Rinjani Forest Management Unit*

Oleh

Chyntia Vada¹, Dr. Ir. Markum, M.Sc.², Budhi Setiawan, S.Hut., M.Si.³

Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram

¹Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Jl. Pendidikan No. 37, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125, Indonesia

Email: vadachyntia@gmail.com

Ringkasan

Salah satu skema dalam perhutanan sosial yaitu hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga dapat menciptakan kemandirian dalam masyarakat dalam mengelola hutan secara optimal sesuai dengan kapasitas yang dibentuk. Dalam pelaksanaan pengelolaannya, perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi. Evaluasi pada hutan kemasyarakatan ini berdasarkan P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019 tentang pedoman izin evaluasi perhutanan sosial. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif. Dalam penentuan responden menggunakan metode kuota sampling dengan responden yang diwawancarai merupakan *key informan*. Didapatkan hasil evaluasi hutan kemasyarakatan sebesar 66% dengan keterangan kategori penilaian Sedang. Kategori Sedang yang diperoleh berdasarkan kondisi yang menggambarkan Kelompok Tani Hutan Giri Madia yang sedang pada tahap perkembangan. Faktor penghambat dalam pengelolaan HKm ini yaitu pengembangan SDA dan SDM yang masih minim, anggaran dana yang kurang serta penanganan gangguan satwa liar yang mengancam jumlah spesies tersebut. Faktor yang mendukung pengelolaan HKm ini yaitu terdapat rencana pengelolaan HKm oleh kelompok tani, terdapat IUPHKm lahan garapan yang masih subur serta bantuan pengadaan peralatan produksi kelompok tani.

Abstract

One of the schemes in social forestry is community forestry. Community forestry aims to improve the welfare of the community so that it can create independence in the community in managing forests optimally in accordance with the established capacity. In the implementation of its management, it is necessary to carry out monitoring and evaluation. This evaluation of

community forestry is based on P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019 concerning guidelines for evaluating social forestry permits. The method used in this research is descriptive method. In determining respondents using quota sampling method with respondents being interviewed are key informants. The results of the community forest evaluation were 66% with a description of the Medium rating category. The Medium category was obtained based on conditions that described the Giri Madia Forest Farmers Group which was in the development stage. The inhibiting factors in the management of this community forestry are the development of natural resources and human resources which are still minimal, the budget is lacking and the handling of wildlife disturbances that threaten the number of these species. Factors that support the management of this community forestry are that there is a community forestry management plan by farmer groups, there is an IUPHKm of arable land that is still fertile and assistance in procuring production equipment for farmer groups.

Kata kunci: HKm, evaluasi, penghambat dan pendukung

Keywords: Community forestry, inhibiting and support

PENDAHULUAN

Hutan merupakan kekayaan alam yang telah diatur oleh pemerintah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat berupa lapangan kerja, mendorong adanya pengembangan wilayah serta mendorong perbaikan ekonomi masyarakat. Keberadaan hutan bagi masyarakat sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pangan, sandang obat-obatan hingga pendapatan keluarga sehingga masyarakat berupaya memanfaatkan hutan secara lestari agar dapat memanfaatkan hutan hingga masa mendatang (Purwoko, 2002). Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara ataupun hutan adat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat sekitar wilayah hutan adat sebagai pelaku utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu skema perhutanan sosial yaitu hutan kemasyarakatan (HKm). Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar hutan dalam mengelola hutan. Skema hutan kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga dapat menciptakan kemandirian dalam masyarakat dalam mengelola hutan secara optimal sesuai dengan kapasitas yang dibentuk. Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan perlu adanya monitoring dan evaluasi agar dapat mengetahui capaian yang

sesuai dengan rangkaian perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Umum (RKU) dan memberikan referensi dalam pelaksanaan perhutanan sosial terutama pengelolaan hutan kemasyarakatan periode 5 tahun berikutnya. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui kinerja pengelolaan HKm; (2) untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pengelolaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di HKm Giri Madia, Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada bulan Juli 2022. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penggambaran terhadap situasi sosial berupa fenomena atau kenyataan sosial dengan menjelaskan beberapa variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti (Mulyadi, 2013). Alat yang digunakan adalah kamera, alat tulis, *recorder* dan laptop. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, data sekunder dari instansi yang terkait, profil HKm Giri Madia.

1. Penentuan Jumlah Sampel

Penentuan jumlah sampel menggunakan metode kuota sampling. Sampling kuota merupakan teknik dalam penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu hingga jumlah (kuota) yang diinginkan

(Sugiyono, 2010). Penentuan responden dengan mengambil 2 responden di setiap sub KTH yang terdiri dari pengurus dan anggota. Responden dalam penelitian ini merupakan *key informan* yang memiliki pengetahuan dan mengetahui informasi terkait perkembangan HKm. Jumlah sub KTH pada HKm Giri Madia sebanyak 12 KTH dan 1 ketua KTH. Jumlah responden yang digunakan yaitu 25 orang.

2. Penentuan Responden

Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu 1 pengurus dan 1 anggota yang aktif. Metode purposive sampling ini merupakan teknik dalam penentuan sampel yang dilakukan dengan sengaja atas berbagai pertimbangan (T,Sjah et al., 2018). Responden yang dipilih lebih diutamakan responden yang lebih menguasai pengetahuan terkait hutan kemasyarakatan yang dikelola. Oleh karena itu, responden tersebut terdiri dari 12 ketua sub pada KTH dan 12 anggota di setiap sub yang direkomendasikan oleh ketua sub kelompok serta ketua KTH Giri Madia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode antara lain metode wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dan responden yang berlandaskan tujuan penelitian (Sagita et al., 2019). Metode

observasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap variabel penelitian yang terdapat pada objek penelitian tersebut. Metode yang terakhir yaitu metode Pemeriksaan Dokumen terkait ketersediaan dan kelengkapan isi dokumen RU & RKT (Sudarsono, 2016 cit. Dianti, 2017). Dokumen yang dimaksud untuk dijadikan pendukung dalam pemberian bobot pada proses analisis hasil evaluasi HKm.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Peraturan Direktorat Jenderal Dan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan No. P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019 tentang Pedoman Evaluasi Izin Perhutanan Sosial. Daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner, data yang terkumpul akan ditabulasi dan dianalisis untuk mendapatkan hasil evaluasi yang didasarkan pada sistem skoring (lampiran). Hasil evaluasi didapatkan dari setiap aspek yang memiliki bobot masing-masing sesuai dengan pertanyaan pada kuesioner.

Pada penelitian ini menekankan evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Giri Madia dari sisi Kelompok Tani Hutan Giri Madia. Data penelitian yang dianalisis pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara anggota kelompok tani hutan. Adapun analisis data yang digunakan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan HKm Giri

Madia yaitu menggunakan analisis data secara deskriptif

Persentase hasil penilaian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hasil Penilaian}}{\text{Nilai Tertinggi}} \times 100\%$$

Nilai Tertinggi adalah Nilai maksimal dari semua indikator Aspek atau Kriteria. Hasil Penilaian adalah Total Nilai semua indikator Aspek atau Kriteria dari hasil monitoring/evaluasi. Kategori Penilaian sebagai berikut:

- Baik : 81-100 %
- Sedang : 60-80 %
- Tidak baik : < 60 %

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada narasumber sebagai sumber informasi. Wawancara dilakukan pada 25 responden. Narasumber dalam wawancara ini merupakan responden kunci (*key informan*) yang memiliki wawasan terkait pengelolaan HKM dan memiliki pemahaman terkait kelompok tani hutan Giri Madia. sehingga didapatkan hasil evaluasi setiap aspek sebagai berikut.

1. Penilaian Umum

Hasil penilaian rata-rata	741	
Nilai Tertinggi	1116	
Persentase penilaian (%)	66	SEDANG

Berdasarkan tabel penilaian umum hutan kemasyarakatan Giri Madia, setelah dilakukannya evaluasi kinerja terkait pengelolaan HKM Giri Madia didapatkan hasil akhir sebesar 66% dengan keterangan kategori penilaian Sedang. Kategori Sedang yang diperoleh berdasarkan kondisi yang menggambarkan Kelompok Tani Hutan Giri Madia yang sedang pada tahap perkembangan. Perubahan kepemimpinan KTH pada tahun 2020 merupakan awal yang baru dalam menghidupkan kembali kelompok tani hutan Giri Madia melalui perubahan struktur pengurus kelompok sebagai upaya peningkatan pengelolaan hutan oleh kelompok. Tahap evaluasi ini merupakan evaluasi 5 tahun pertama setelah izin hutan kemasyarakatan Giri Madia terbit

a. Aspek Prasyarat

ASPEK PRASYARAT	Ket.
Kriteria Ketersediaan dokumen perencanaan perhutanan sosial	ada

Dalam variabel aspek prasyarat dilakukan pengecekan ketersediaan dokumen kelengkapan berupa dokumen rencana umum dan rencana kerja tahunan, terkait hal tersebut KTH Giri Madia memiliki dokumen yang lengkap. Dalam aspek prasyarat ini, menekankan pada kelengkapan persyaratan utama yang dipenuhi kelompok tani dalam melakukan evaluasi. Adapun kelengkapan yang dimaksud berupa

dokumen rencana kerja (Rencana kerja umum & rencana kerja tahunan).

b. Aspek Produksi/Ekonomi

Aspek	Interval Nilai		Rata-rata Hasil Nilai	Kategori Penilaian	
	Terendah	Tertinggi		Persentase (%)	Kategori
ASPEK PRODUKSI/EKONOMI				59	TIDAK BAIK
1) Kriteria Tata Kelola Sumber Daya Hutan	63	189	131	70	SEDANG
2) Kriteria Tata kelola hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	30	90	53	59	TIDAK BAIK
3) Kriteria Usaha Ekonomi Hasil Hutan	50	150	74	49	TIDAK BAIK

Pada aspek produksi/ ekonomi, hasil penilaian masuk pada kategori Tidak Baik yaitu sebesar 59%. Dalam aspek produksi/ekonomi memiliki 3 kriteria penilaian yaitu pada kriteria tata kelola sumber daya hutan memiliki hasil penilaian sebesar 70% (Kategori Sedang). Pada kriteria tata kelola hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan didapatkan nilai akhir sebesar 59% (Kategori Tidak Baik). Hutan kemasyarakatan Giri Madia yang terdiri dari 100% hutan lindung dan terdapat larangan menebang pohon menjadikan pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu sebesar 0% s/d 60% serta pemanfaatan HHBK yang belum maksimal mengakibatkan pada kriteria ini masuk pada kategori Tidak Baik. Sedangkan pada kriteria usaha ekonomi hasil hutan didapatkan nilai akhir sebesar 49.

c. Aspek Ekologi

Kegiatan usaha yang dijalani kelompok tani hutan yang tidak maksimal, sistem informasi dan pemasaran yang masih minim, serta pengelolaan jasa lingkungan yang tidak dikembangkan mengakibatkan hasil penilaian pada kriteria ini masuk pada kategori Tidak Baik.

Aspek	Interval Nilai		Rata-rata Hasil Nilai	Kategori Penilaian	
	Terendah	Tertinggi		Persentase (%)	Kategori
ASPEK EKOLOGI				69	SEDANG
1) Kriteria fungsi kawasan hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya	40	120	72	60	SEDANG
2) Kriteria Keanekaragaman jenis dan produk sumber daya hutan terjaga/ meningkat	11	33	24	72	SEDANG
3) Perbaikan kondisi hidrologis	14	42	39	94	BAIK
4) Perlindungan Hutan	29	87	44	51	TIDAK BAIK

Aspek ekologi memiliki 4 (empat) kriteria penilaian. Pada aspek ekologi memiliki hasil akhir sebesar 69% (Kategori Sedang). Kriteria fungsi kawasan hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya mendapat nilai sebesar 60% (kategori Sedang). Hal ini diakibatkan tidak adanya luasan tutupan hutan untuk hutan produksi dikarenakan secara keseluruhan HKm Giri Madia merupakan wilayah hutan lindung. Pada kriteria keanekaragaman jenis dan produk sumber daya hutan terjaga/meningkat memiliki nilai sebesar 72% (kategori Sedang). Nilai ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara bahwa jumlah dan keragaman jenis tanaman dan satwa tersebut tetap sedangkan keberadaan spesies endemik yang mulai berkurang. Pada kriteria perbaikan kondisi hidrologis memiliki hasil penilaian sebesar 94% (kategori Baik), hal ini dikarenakan sumber mata air dalam kawasan hutan masyarakat yang masih terjaga. Sedangkan

pada kriteria perlindungan hutan mendapat nilai sebesar 51% (kategori Tidak Baik). Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian pada indikator pengamanan hutan, kegiatan pencegahan/penanganan kebakaran hutan serta kegiatan pemeliharaan dan perlindungan hutan dari hama dan penebangan liar yang sangat minim dilakukan.

d. Aspek Sosial

Aspek	Interval Nilai		Rata-rata Hasil Nilai	Kategori Penilaian	
	Terendah	Tertinggi		Persentase (%)	Kategori
ASPEK SOSIAL				71	SEDANG
1) Kriteria Peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa	19	57	38	67	SEDANG
2) Kriteria Penguatan kelembagaan	61	183	154	84	BAIK
3) Kriteria Perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola	14	42	35	83	BAIK
4) Kriteria Resolusi Konflik	15	45	27	61	SEDANG
5) Sensitivitas Gender	16	48	31	65	SEDANG
6) Kriteria Kontribusi pengelolaan hutan terhadap pihak terkait	10	30	20	67	SEDANG

Dalam aspek sosial mendapatkan hasil penilaian sebesar 71% (Kategori Sedang). Pada kriteria peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa memiliki nilai sebesar 67%, hal ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan masih terdapat petani hutan yang pendapatannya belum meningkat setelah memperoleh izin mengelola lahan garapan pada HKm ini. Sedangkan pada kriteria penguatan kelembagaan memiliki nilai sebesar 83% (Kategori Baik). Perubahan struktur pengurus kelompok tani mengakibatkan KTH Giri Madia mulai aktif dalam membangun ruang diskusi dalam kelompok. Pada kriteria perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola memiliki nilai sebesar

35, hal ini dikarenakan pengurus kelompok tani hutan Giri Madia sedang pada masa pembenahan dengan kepemimpinan baru pada tahun 2020 dan tidak ada ditemukan kasus penebangan hutan oleh pengurus maupun anggota kelompok. Dalam kriteria resolusi konflik didapatkan nilai sebesar 61% (kategori Sedang), banyaknya anggota kelompok yang tidak mengetahui adanya aturan internal yang mengatur terkait penanganan konflik. Sedangkan pada kriteria sensitivitas gender mendapatkan hasil penilaian sebesar 65% (Kategori Sedang). Hal ini didapatkan dari adanya keterwakilan perempuan dalam beberapa sub kelompok namun belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan kelompok. Dan pada kriteria

kontribusi pengelolaan hutan terhadap pihak terkait mendapatkan hasil penilaian sebesar 67% (kategori Sedang), hal ini dikarenakan belum adanya dana/bantuan dari pihak pengelola hutan yang diperuntukkan untuk kegiatan dalam pembangunan desa.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1. Prasyarat	Terdapat RU dan RKT	Belum ada anggaran dari iuran kelompok yang diperuntukkan untuk pengadaan bibit tanaman
2. Produksi/ Ekonomi	Terdapat IUPHKm serta kartu anggota sebagai bukti memiliki izin kelola	Pengembangan usaha dari hasil hutan bukan kayu yang sangat minim
3. Ekologi	Lahan garapan yang masih subur	Penanganan terhadap gangguan satwa liar yang mengancam keberadaan spesies
4. Sosial	Adanya bantuan dari beberapa pihak	Sosialisasi kepada anggota kelompok yang masih minim oleh pihak resort terkait pengembangan kualitas SDM

a. Aspek Prasyarat

Pada aspek prasyarat, faktor pendukung pengelolaan HKm ini yaitu adanya Rencana Umum (RU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Kelompok Tani Hutan Giri Madia merupakan wadah dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan ini. Kelompok Tani Hutan Giri Madia ini memiliki Rencana Umum (RU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai pedoman pengelolaan HKm dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Namun pada aspek prasyarat ini memiliki faktor penghambat yaitu

Dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Giri Madia dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat menjadi pendukung dan penghambat berjalannya program dalam pelaksanaan perencanaan pengelolaan HKm. Berikut tabel faktor pendukung dan penghambat pengelolaan HKm Giri Madia

kurangnya dukungan dalam pelaksanaan RKT yang telah disusun. Hal ini didasarkan karena belum ada dana yang diperuntukkan untuk pengadaan bibit tanaman apotek hidup dari iuran kelompok tani, sehingga program tersebut tidak dapat berjalan.

b. Aspek Produksi/Ekonomi

Pada aspek produksi/ ekonomi memiliki beberapa faktor pendukung yaitu terdapat AD/ART, terdapat IUPHKm, serta terdapat kartu anggota sebagai identitas hak kelola serta ketersediaan peta areal garapan. Dengan adanya IUPHKm, masyarakat dapat mengelola hutan serta memanfaatkan hasil hutan secara legal. Adapun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran

Rumah Tangga (ART) berisi tentang aturan dalam pemanfaatan hutan yang berasal hasil musyawarah antar anggota kelompok tani hutan dengan mengedepankan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Dalam AD&ART juga menjelaskan hak dan kewajiban yang harus Pada peta areal garapan, telah jelas pembagian wilayah garapan dari 12 sub kelompok KTH yang ada. Dalam peta areal garapan ini juga memiliki batas-batas administrasi pemerintahan dan batas fungsi kawasan hutan. Peta ini telah disepakati oleh pihak Resort Jangkok, pihak desa serta Kelompok Tani Hutan Giri Madia.

Sedangkan faktor penghambat pada aspek ini yaitu pengembangan hasil hutan bukan kayu yang masih sangat minim. Banyaknya hasil hutan bukan kayu yang tidak terjual dan tidak dapat diolah menjadikan pendapatan petani tetap bahkan menurun. Kurangnya pengetahuan dan kreativitas masyarakat dalam mengelola hasil hutan bukan kayu menjadi sebuah produk adalah permasalahan yang belum dapat teratasi.

c. Aspek Ekologi

Pada aspek ekologi memiliki faktor pendukung yaitu lahan garapan yang masih subur. Dengan kondisi hutan yang masih asri dan terjaga menjadikan tanah pada kawasan HKm ini subur sehingga vegetasi yang ada tumbuh dengan baik. Hal ini juga menguntungkan petani hutan karena petani tidak memerlukan pupuk dalam menyuburkan areal garapan. Sedangkan

faktor penghambat pada aspek ini yaitu gangguan satwa liar. Kawasan hutan kemasyarakatan Giri Madia juga menjadi habitat beberapa satwa, salah satu diantaranya yaitu monyet. Keberadaan kawanan monyet pada kawasan areal garapan menjadi keluhan beberapa petani hutan. Hal ini dikarenakan terganggunya hasil panen dari areal garapan petani, sehingga dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh petani.

d. Aspek Sosial

Pada aspek sosial memiliki faktor pendukung yaitu adanya bantuan dari beberapa pihak. Dalam rangka pengembangan usaha pengolahan gula semut yang dikelola kelompok, KTH Giri Madia telah mendapatkan bantuan dana hibah yang diperoleh dari Bank Dunia melalui event Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project (SCBNRM_ID) World Bank. Sedangkan faktor penghambat pada aspek ini yaitu sosialisasi kepada anggota kelompok yang masih minim dilakukan oleh pengurus maupun pihak resort.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Pada hasil evaluasi yang dilakukan terkait kinerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Giri Mada Resort Jangkok Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat ini diperoleh hasil penilaian yaitu sebesar 67% dengan keterangan kategori Sedang. Nilai ini diperoleh dari hasil gabungan nilai rata-rata dari aspek prasyarat, produksi/ ekonomi, ekologi dan sosial.
2. Pada aspek prasyarat, faktor pendukung pengelolaan HKm ini yaitu adanya RU dan RKT. Sedangkan faktor penghambat yaitu belum ada anggaran dana dari iuran kelompok yang diperuntukkan untuk pengadaan bibit tanaman. Pada aspek produksi/ ekonomi memiliki beberapa faktor pendukung yaitu terdapat IUPHKm serta terdapat kartu anggota sebagai identitas hak kelola. Sedangkan faktor penghambat pada aspek ini yaitu pengembangan usaha dari hasil hutan bukan kayu yang sangat minim. Pada aspek ekologi memiliki faktor pendukung yaitu lahan garapan yang masih subur, sedangkan faktor penghambat pada aspek ini yaitu penanganan terhadap gangguan satwa liar. Pada aspek sosial memiliki faktor pendukung yaitu adanya bantuan dari beberapa pihak. Sedangkan faktor

penghambat pada aspek ini antara lain sosialisasi kepada anggota kelompok yang masih minim oleh pihak resort terkait pengembangan kualitas SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Cantika, L. (2021). *ANALISA PENGATURAN COMMONS SEBAGAI STRATEGI PENGHIDUPAN MASYARAKAT PENGELOLA HKm SIPATUO II di MASA PANDEMI COVID-19*. Universitas Hasanudin.
- Dianti, P. R. (2017). *EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN BERDASARKAN ASPEK TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA USAHA DI HKm SENGGIGI KABUPATEN LOMBOK BARAT*. Universitas Mataram.
- Ekawati, S. (2020). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan untuk Memastikan Tercapainya Tujuan Perhutanan Sosial*.
- Fauzi, A. (2020). Evaluasi Pascapelatihan pada Kelompok Tani Hutan Pemegang Izin Perhutanan Sosial di Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun 2019. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 289–296. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.6.3.289-296>
- H., R., Sofia, Y., Marbyanto, E., & Mustofa, A. (2011). *TATA CARA dan PROSEDUR Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda.
- Haerani, S., Sumardi, Hakim, W., Hartini, & Putra, A. H. P. K. (2020). Structural model of developing human resources performance: Empirical study of Indonesia States Owned Enterprises. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(3),

- 211–221.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n03.211>
- Hakim, I., Irawanti, S., Murniati, Sumarhani, Widiarti, A., Effendi, R., Muslich, M., & Rulliaty, S. (2010). *Social forestry: menuju restorasi pembangunan kehutanan berkelanjutan* (S. A. dan I. Hakim (ed.)). Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A. J., & Inoue, M. (2014). Present State of Community Forestry (Hutan Kemasyarakatan/HKm) Program in a Protection Forest and Its Challenges: Case Study in Lampung Province, Indonesia. *Journal of Forest and Environmental Science*, 30(1), 15–29. <https://doi.org/10.7747/jfs.2014.30.1.15>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2016). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial* (p. 12).
- Larasati, A. P., Wulandari, C., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. (2021). Peran Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Belantara*, 4(1), 39–47. <https://doi.org/10.29303/jbl.v4i1.448>
- Menlhk. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–268.
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Pratama, A. C., & Rijanta, R. (2021). Pengelolaan Berbasis Gender Pada Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 3(2), 80–99. <https://doi.org/10.35814/jlr.v3i2.2408>
- Purba, C. P. ., Nanggara, S. G., Ratriyono, M., Apriani, I., Rosalina, L., Sari, N. A., & Meridian, A. H. (2013). *Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI) Periode 2009 - 2013*. Forest Watch Indonesia.
- Purwoko, A. (2002). KAJIAN AKADEMIS HUTAN KEMASYARAKATAN. In *Sumatera Utara*. USU digital library. <https://doi.org/10.1017/cbo9781316530122.006>
- Roberts, I., Shakur-Still, H., Afolabi, A., Akere, A., Arribas, M., Brenner, A., Chaudhri, R., Gilmore, I., Halligan, K., Hussain, I., Jairath, V., Javid, K., Kayani, A., Lisman, T., Mansukhani, R., Mutti, M., Arif Nadeem, M., Pollok, R., Simmons, J., ... Beqiri, A. (2020). Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding (HALT-IT): an international randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *The Lancet*, 395(10241), 1927–1936. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30848-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30848-5)
- Sagita, M. N., Akhbar, & Muis, H. (2019). Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*, 7(2), 1–10.
- Sahrin, A. (2020). *Evaluasi Program Kemitraan Kehutanan dengan BKPH Rinjani Timur Lombok Timur* [Universitas Mataram]. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.6.3.289-296>
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.pdf. In *Bandung* (p. 143). Alfabeta, cv.
- T, M. R. M., Sjah, T., & Setiawan, B. (2018). Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Kelompok Tani Monggo Lenggo di Hutan Kemasyarakatan Desa Karamabuta Kabupaten Dompu. *Universitas Mataram Repository*, 1–6.

Witno, W., Maria, M., & Supandi, D. (2020).
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKm)
TANDUNG BILLA DI KELURAHAN
BATTANG KOTA PALOPO. *Jurnal
Penelitian Kehutanan BONITA*, 2(2), 35–
42.
<https://doi.org/10.55285/bonita.v2i2.556>